BAB II

PELAKSANAAN PKL

2.1 Kegiatan PKL

Aktivitas atau kegiatan PKL yang dilaksanakan penulis selama 25 hari terhitung dari 04 Juli 2011 – 04 Agustus 2011 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jln. RE. Martadinata No. 54, Bandung tepatnya di bagian Humas dengan waktu kerja setiap hari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WIB. Kegiatan selama PKL disesuaikan dari pengarahan yang diberikan pembimbing yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab penulis untuk melaksanakannya.

Cakupan kegiatan selama PKL antara lain membuat kliping pers dari surat kabar harian lokal, mendistribusikan hasil kliping pers ke ruang asisten intelijen, mencatat surat masuk ke dalam agenda tahunan Penkum, memasukan surat dinas masuk ke dalam arsip tahunan Penkum, mengecek surat masuk Penkum di agenda tahunan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Berikut kegiatan harian yang dilakukan :

No	Hari/Tgl	Kegiatan	Sifat	
			Rutin	Insidentil
1	Senin 04/07/2011	• Pengarahan dari pembimbing dan perkenalan dengan praktisi Humas dan beberapa karyawan. • Menyalin kartu penerus disposisi		✓

		ke buku agenda surat masuk rahasia.		
2	Selasa 05/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers ke setiap bidang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.	✓	
3	Rabu 06/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Menyalin kartu penerus disposisi ke buku agenda surat masuk rahasia.	✓	
4	Kamis 07/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Menyalin surat masuk dan keluar ke dalam buku Penkum Humas.	✓	
5	Jumat 08/07/2011	• Pembukaan HUT Kejati ke-51 • Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Menyalin kartu penerus disposisi ke buku agenda surat masuk rahasia.		✓
6	Senin 11/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari	✓	

		harian lokal. • Menyalin kartu penerus disposisi ke buku agenda surat masuk rahasia.		
7	Selasa 12/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Menyalin kartu penerus disposisi ke buku agenda surat masuk rahasia.	✓	
8	Rabu 13/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendata surat masuk Penkum di agenda tahunan.	✓	
9	Kamis 14/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendata surat masuk Penkum di agenda tahunan.	✓	
10	Jumat 15/07/2011	• Memasukkan dan memindahkan surat masuk Penkum dan Humas.	✓	
11	Senin 18/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mencatat surat masuk ke buku Penkum Humas. • Mengikuti kegiatan donor darah	✓	

		dalam rangka HBA.		
12	Selasa 19/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
13	Rabu 20/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
14	Kamis 21/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Menyalin buku agenda tahunan Penkum Humas.		
15	Jumat 22/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Menyalin surat ke dalam buku agenda tahunan Penkum Humas.	✓	
16	Senin 25/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers ke ruang asisten intelijen.		
17	Selasa 26/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers	✓	

		ke ruang asisten intelijen.		
18	Rabu 27/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
19	Kamis 28/07/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Register surat-surat masuk dan keluar dari asisten intelijen.	✓	
20	Jumat 29/07/2011	• Kagiatan makan bersama di Penkum Humas sebelum memasuki bulan puasa.		✓
21	Senin 01/08/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers ke ruang asisten intelijen. • Register surat-surat masuk dan keluar dari asisten intelijen	✓	
22	Selasa 02/08/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Mendistribusikan hasil kliping pers ke ruang asisten intelijen. • Register surat-surat masuk dan keluar dari asisten intelijen	✓	

23	Rabu 03/08/2011	• Register surat masuk dan keluar dari asisten intelijen.		
24	Kamis 04/08/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Register surat masuk dan keluar dari asisten intelijen.		
25	Jumat 05/08/2011	• Mengkliping surat kabar dari harian lokal. • Perpisahan, hari terakhir PKL.		

Tabel 2.1 : Penjelasan kegiatan harian

2.2 Deskripsi Kegiatan Selama PKL

2.2.1 Deskripsi Kegiatan Rutin Selama PKL

Pada hari pertama yaitu tanggal 04 Juli 2011 selain pengenalan terhadap karyawan-karyawan Penkum Humas, penulis juga diberi pengarahan mengaenai tata cara apa yang harus dilakukan selama *job training*.

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, antara lain sebagai berikut :

- **Mengkliping dan Dokumentasi Surat Kabar Harian Lokal**

Dokumentasi dan kliping merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan menelaah, menganalisa dan kemudian mengevaluasi perkembangan Dari kemajuan Instansi, aktivitas dan program acara tertentu. Dokumentasi adalah

kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi dan menganalisa kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentang suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. Sedangkan bentuk kliping adalah kegiatan memilih, menggunting, dan menyimpan. (Ruslan, 2003:207).

Fungsi kliping adalah sebagai acuan bagi para top managemen dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan yang menyangkut publik utama organisasi. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana pihak media memandang kinerja perusahaan kita dan sekaligus ukuran opini public terhadap perusahaan.

Selama PKL aktivitas rutin yang lakukan oleh Penulis di setiap harinya adalah Mengkliping dan Dokumentasi surat kabar harian lokal. Pembutan kliping ini berupa berita mengenai masalah-masalah yang ditangani Kejaksaan. Demi kemudahan dalam pencarian arsip, maka selayaknya berita yang memang dibutuhkan oleh Penkum Humas sewaktu-waktu dapat dicari dengan mudah. Berita masih tetap seputar masalah yang tengah ditangani atau bahkan yang akan ditangani. Proses kegiatan pengklipingan bersumber dari surat kabar dari berbagai media cetak diantaranya adalah :

1. Kompas
2. Pikiran Rakyat
3. Republika
4. Tribun Jabar
5. Galamedia
6. Medikom

Cara pendokumentasian berita berdasarkan urutan Media cetak – Hari – Tanggal – Bulan – Tahun – Judul – Halaman – Kolom.

Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan pengkelipingan surat kabar harian lokal supaya untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat atau khalayak setiap saat dengan cara memantau melalui berbagai media massa yang ditunjukan sebagai acuan tentang seputar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain itu, fungsi dari pengkelipingan yaitu didokumentasikan agar apabila terjadi kejadian di masyarakat yang menimbulkan citra negatif, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bisa dengan segera merubah citra negatif menjadi citra positif.

Adapun Contoh kliping dari berita yang di ambil dari surat kabar sebagai berikut :

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L. R.E. MARTADINATA BANDUNG

'T

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (Pikiran Rakyat) (~~Kompas~~) (~~Republika~~) (~~Tribun Jabar~~) (~~Galamedia~~).		
Hari	: (~~Senin~~) (Selasa) (~~Rabu~~) (~~Kamis~~) (~~Jum'at~~)		
Tanggal	: 05		
Bulan	: Juli	Tahun	: 2011
Halaman	: 19	Kolom	: 1-5
Topik	: (~~Kejagung~~ / Kejaksaan) (~~Kejati~~ & Kejari) (Persidangan)		

Sidang Pembunuhan Ricuh

Keluarga Korban tak Terima Vonis 10 Tahun Bagi Terdakwa

INDRAMAYU, (PR).-
Sidang putusan kasus pembunuhan dengan korban Untung Trianto (16) di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Senin (4/7) berakhir ricuh. Massa mengamuk di ruang sidang setelah hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap terdakwa Febri Antoro (15) alias Anto.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Haryanta tersebut, terdakwa Febri dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Namun karena usia terdakwa masih di bawah umur, berdasarkan Undang Undang 3/1997 tentang Peradilan Anak, hukuman dikenakan separuhnya, yakni 10 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan anak.

Keluarga dan kerabat korban yang sudah berkumpul sejak pagi di dalam dan di luar ruang sidang tidak puas dengan vonis tersebut. Mereka semakin naik pitam setelah terdakwa Febri keberatan dan meminta banding atas vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan.

Massa langsung merangsek ke depan ruang sidang dan bertahanan.

Karena tak puas, massa berkumpul di jalan raya depan PN. Mereka berteriak emosional memaki jaksa dan hakim yang dinilai tidak adil. Meskipun dalam penjagaan polisi, kondisi tersebut sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Selain berakhir ricuh, sidang putusan kasus pembunuhan bermotif dendam itu juga diwarnai tangis histeris keluarga, terutama ibu korban.

Tidak terima dengan putusan hakim, ibu korban, Wiwin, menangis dan menjerit histeris memaki keputusan hakim dan tuntutan jaksa yang dianggapnya tak adil.

"Anak saya meninggal dengan cara yang menyedihkan, ditusuk puluhan kali, tetapi pembunuh sadis itu hanya dihukum 10 tahun. Ini tidak adil, hakim dan jaksa disuap, saya minta nyawa dibayar nyawa," ujar Wiwin di sela-sela isak tangisnya.

Teman korban

Sebagai informasi, Febri Antoro alias Anto didakwa dalam kasus pembunuhan terhadap teman sekaligus tetangganya sendiri, Untung Trianto. Ke-

Jenazah Untung Trianto temukan dengan kondisi ngenaskan pada dini hari April lalu di tengah areal p sawahan di Blok Tanggul 2 nal, Desa/Kec. Kedokanb der. Tubuh korban berlumu darah dan ditemukan ban luka tusukan benda tajam p bagian perut, dada, sampai her.

Hanya beberapa jam set penemuan jenazah Untu polisi berhasil memburu menangkap Febri yang bers bunyi di rumah pamanny Karawang.

Dalam persidangan, Fe mengakui membunuh Unt karena merasa sakit hati se diejek temannya itu. Febri jerat pasal 340 KUHP tent Pembunuhan Berencana dinyatakan bersalah atas pe bunuhan Untung. **(A-168)***

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

Kepada Yth : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
Dari : ASISTEN INTELIJEN.
Nomor : ND- 412 / O.2.3 / L.3 / 07/ 2011
Tanggal : 05 Juli 2011
Sifat : B i a s a.
Lampiran : -
Perihal : Klipping Pers berjudul : "Sidang Pembunuhan Ricuh".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Pikiran Rakyat hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 yaitu : "Sidang Pembunuhan Ricuh", Halaman 19, Kolom 1 s/d 5 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Keluarga korban pembunuhan Untung Trianto (16), tidak terima dengan tuntutan sepuluh tahun penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Febri Antoro (15) yang taklain adalah teman korban. Keluarga meminta majelis hakim memberikan hukuman setimpal karena pelaku telah menghilangkan nyawa Untung Trianto yang melanggar pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Namun karena usia terdakwa masih dibawah umur, berdasarkan Undang-Undang 3/1997 tentang Peradilan Anak, hukuman dikenakan separuhnya, yakni 10 tahun penjara di lembaga permasyarakatan anak.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SAMPE TUAH, SH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19600306 198010 1 001

TEMBUSAN :
1. A R S I P ;

- **Administratif**

Administrasi berasal dari Bahasa Belanda, "*Administratie*" yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut : Clerical works (FX.Soedjadi, 1989).

Administrasi dalam arti luas, berasal dari Bahasa Inggris "*Administration*" yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973).

Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kegiatan Administrasi ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengoptimalisasikan bentuk-bentuk kerjasama dalam upaya membantu kinerja kelangsungan Penkum Humas. Selain itu kegiatan administrasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan setiap keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang dimiliki setiap kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama (organisasi) dan atau tujuan individu.

Pelaksanaan kegiatan administrasi pada Job Training adalah upaya membantu kinerja kelangsungan Penkum Humas. Kegiatan administratif yang dilakukan seperti;

a. Mendata surat-surat baik surat masuk maupun surat yang keluar ke dalam arsip map yang telah disediakan.
b. Mencatat surat dinas masuk ke dalam agenda tahunan penkum
c. Membantu kebutuhan karyawan seperti mengetik.

- **Distribusi Data**

Kegiatan ini mengenai pendistribusian hasil data yang telah di dokumentasikan, maka hasil kliping berita di distribusikan ke rungan Asisten Intelijen untuk di tanda tangani dan di tindaklanjuti.

2.2.2 Deskripsi Kegiatan Insidentil Selama PKL

Kegiatan insidentil yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, antara lain sebagai berikut :

- **Dokumentasi Kegiatan Acara Ulang Tahun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang Ke-52.**

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. (Guba dan Lincoln 1981:228)

Sehubungan dengan memeriahkan hari jadi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang Ke-51, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2011 di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dihadiri oleh Kejari Bandung, Kejari Sukabumi, Kejari Kuningan, Kejari Indramayu, Kejari Cianjur, Kejari Sumber, Kejari Garut, Kejari Ciamis, Kejari Tasikmalaya, Kejari Sumedang, Kejari Bale Bandung, Kejari Banjar, Kejari Subang, Kejari Karawang, Kejari Cirebon, Kejari Purwakarta. Kegiatan ini mengadakan berbagai macam acara diantaranya Perlombaan olahraga serta pemberian hadiah kepada pemenang dari perlombaan tersebut. Kegiatan dokumentasi ini dilakukan hanya sekali saja saat melakukan kerja praktek di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

2.3 Deskripsi Tentang Hubungan Masyarakat

Public Relations (selanjutnya PR) atau di Indonesia lebih populer disebut Hubungan Masyarakat (Humas) adalah profesi atau pekerjaan yang sangat menarik sekaligus juga menantang. Hubungan Masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok didalam masyarakat yang menaruh perhatian pada semua hal yang sama, minat dan kepentingan yang sama. dimana suatu kelompok masyarakat yang bersifat heterogen, terdapat kelompok masyarakat yang bersifat homogen

didalamnya. Homogenitas inilah yang disebut sebagai "Masyarakat". Minat dan perhatian suatu masyarakat bisa berupa orang, benda, lembaga, dan sebagainya. Masyarakat sendiri dapat merupakan grup kecil yang terdiri dari beberapa orang dengan jumlah yang sedikit, atau dalam bentuk kelompok besar. Biasanya individu-individu yanag termasuk dalam kelompok ini mempunyai rasa solidaritas pada kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata dan tidak berada dalam suatu tempat atau ruangan serta tidak mempunyai hubungan secara langsung.

Pengertian kata "Hubungan" dalam kaitanya dengan Hubungan Masyarakat, adalah jamak, berarti hubungan dengan banyak pihak yang mempunya interest atau kepentingan sama pada suatu hal. Dimana hubungan yang tercipta diantara pihak-pihak yang bersangkutan bersifat dua arah, timbal balik dan saling menguntungkan.

Hubungan Masyarakat adalah segala bentuk kontak dan hubungan yang diadakan oleh suatu organisasi dengan semua bentuk " publik" baik internal maupun eksternal, hubungan ini adalah meliputi semua bentuk komunikasi untuk terbentuknya suatu komunikasi harus terdapat unsur menerima dan memberi" atau dialog-dialog dengan pihak-pihak yang berhubungan, dan unsur-unsur yang ada di dalamnya (humas) adalah: 1) fungsi manajemen, 2) fungsi komunikasi, 3) fungsi penelitian dan penilaian, 4) suatu fungsi yang dirancang untuk meningkatkan saling pengertian, keserasian, dan masukan yang demokratis ke dalam suatu proses pengambilan keputusan.

Rachmadi menyebutkan bahwa humas adalah salah satu bidang Ilmu Komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu organisasi satu perusahaan dalam melaksanakan fungsi manajemen. Humas berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua itu bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan goodwill (kamauan baik) publiknya serta memperoleh opini public yang menguntungkan.

Pengertian Hubungan Masyarakat menurut kamus *The British Institute of Public Relations,* yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan bulan November 1987, dalam **Anggoro** dan bukunya yang berjudul **Teori & Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia** bahwa :

> Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. (2008:2)

Dari definisi diatas humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang di organisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama sekali tidak bias dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan

kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan (atau lazim disebut sebagai seluruh khalayak atau publiknya)

Essensi Humas menurut Onong Uchyana Effendy, yang disebutnya sebagai ciri-ciri atau karakteristik Humas :

- Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik.
- Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan ditetapkannya oleh manajemen suatu organisasi.
- Publik yang menjadi sasaran kegitan Humas adalah publik intern dan ekstern.
- Oprasionalisasi Humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. (Yuliantia, 2000:38)

Fungsi utama kegiatan hubungan masyarakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan antara organisasi dengan publiknya secara internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga atau perusahaan.

Edward L. Bernay, yang dikutip Rosady Ruslan dalam bukunya *"Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi"*, ada tiga fungsi utama hubungan masyarakat, yaitu:

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
3. Berupaya untuk mengitegrasikan sikapdan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengansikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. (2008:18)

Menurut Abdurrachman dalam "Dasar-dasar *Public relations*" tujuan hubungan masyarakat adalah :

> Mengembangkan *goodwiil* dan memperoleh opini publik yang *favourable* atau menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik, kegiatan Public Relations harus dikerahkan kedalam dan keluar. (1990:34)

Secara umum, tujuan hubungan masyarakat adalah untuk mendapatkan *goodwill,* menciptakan, memelihara, dan meningkatkan citra perusahaan/organisasi di mata publik. Tujuan tidak muncul begitu saja. Pada hakekatnya, tujuan hubungan masyarakat muncul dari pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat itu sendiri. Tugas Humas dalam sebuah perusahaan adalah menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan melalui saluran-saluran

komunikasi yang ada. Menjaga reputasi perusahaan tidak lebih mudah dibandingkan dengan membangun reputasi itu sendiri.

Adapun Humas berperan sebagai mediator antara pimpinan manajemen dengan karyawan mayoritas responden menyatakan sependapat, hal ini membuktikan bahwa sebetulnya kehadiran Humas dbutuhkan dalam sebuah lembaga atau perusahaan.

2.4 Analisis Kegiatan Selama PKL

Sebagaimana dengan keilmuan ilmu komunikasi konsentrasi humas. Kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan oleh Penulis di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ditempatkan pada bagian Penerangan Hukum Hubungan masyarakat. Keberadaan humas di sebuah perusahaan atau organisasi sangat penting karena menyangkut pencitraan yang baik sebuah perusahaan atau organisasi. Keberadaan Humas begitu penting sebagai salah satu pewujud keberhasilan perusahaan.

Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat posisi Humas memegang peranan penting dalam meningkatkan citra lembaga dan mengatur publik intern maupun extern, kegiatan Humas Kejati Jabar dilaksanakan sesuai dengan PR-Excellence yang terbagi menjadi tiga macam yaitu berkaitan dengan Komunikasi, Media dan Penyuluhan Kesadaran Hukum.

- Komunikasi

Manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya komunikasi. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum

komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa interaktif, komunikasi transakti/transaktif, komunikasi bertujuan atau komunikasi tak bertujuan.

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Di dalam kelompok / organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan / karyawan.

Di antara kedua belah pihak harus ada *two-way-communications* atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerja sama tersebut terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial / kebudayaan. Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Kegiatan komunikasi dalam Humas di Kejati Jabar ditunjukan kepada masyarakat yang ada dalam organisasi (internal) dan masyarakat luar organisasi (eksternal). Komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu Komunikasi personal / pribadi dan Komunikasi kelompok. Yang penting untuk memberi pengertian bahwa

komunikasi dalam Humas, sentral dan mempunyai peranan penting dalam pencapain tujuan yang telah ditentukan.

Teknologi berkembang begitu pesat, sehingga interaksi antara anggota masyarakat semakin meningkat jangkauannya dan makin bertambah luas. Maka dari itu komunikasi tatap muka dan melalui media massa sekarang ini lebih dipakai secara terpadu guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Sebuah organisasi yang modern memiliki struktur yang kompleks dari berbagai ragam kegiatan khusus. Dengan komunikasi semuanya dapat di lakukan guna mencapai tujuan tersebut.

Memperhatikan pentingnya peranan komunikasi itu dalam pelaksanaan fungsi Humas dalam organisasi secara keseluruhan, maka komunikasi bertindak yaitu berinteraksi dan mempengaruhi seluruhnya. Komunikasi diperlukan untuk membuat organisasi bersatu dan berfungsi. Maka komunikasi adalah tanggung jawab dari setiap orang. Aliran melalui organisasi hanya bisa efektif, jika aliran antara pribadi-pribadi yang membangun organisasi itu juga efektif.

- Media

Media komunikasi yang penting digunakan humas adalah dalam kemitraannya dengan media pers (cetak atau elektronik). Dimana Humas di Kejati Jabar mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di daerah, instansi pemerintah, media massa dan masyarakat. Dengan adanya media komunikasi ini komunikan dan komunikatornya tidak bertatap

muka langsung walaupun pada jarak yang dekat namun berbeda ruangan dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan Humas di Kejati Jabar menjalin hubungan pers atau *Media Relation* yang baik dengan para pemimpin dan reporter / wartawan surat kabar, majalah, radio dan televisi sangat penting untuk dilakukan, sebab antara humas dan media saling bergantungan dan tidak dapat dipisahkan masing-masing saling membutuhkan. Perlakuan yang berdasarkan *like* dan *dislike* dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita-berita / tulis-tulisan yang tidak akurat, bahkan berita yang tidak benar tentang organisasi / perusahaan itu, yang mungkin dapat membawa kerugian.

Hubungan media adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun profesi humas suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang (*balance*). Dalam profesi humas hubungan media juga sering kali dipahami sebagai penanganan krisis dengan memberitakan tentang hal-hal positif tentang perusahaan saat perusahaan sedang dilanda berita negatif. Pada saat krisis cara terbaik penanganan hubungan media oleh humas adalah dengan mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan menginformasikan usaha-usaha ke depan. Dalam hal ini baik media massa maupun humas dalam posisi saling memanfaatkan dan saling diuntungkan (simbiosis mutualisme).

Kaitan Humas dengan pers / media massa harus tetap erat, karena Humas tidak dapat meninggalkan pers sebagai sarana informasi publikasi Humas, sebaliknya pers membutuhkan informasi resmi, akurat dan lengkap, biasanya

didapatkan dari Humas. Secara tidak langsung Hubungan Humas dan pers saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang bersifat simbiosis. Agar Humas sebagai sumber berita dapat dengan mudah dihubungi dan sebaliknya Humas tidak menemui kesulitan untuk menyampaikan informasi atau membantah / menetralisir berita yang dimuat media massa, maka penting sekali bagi Humas untuk selalu membina hubungan baik dengan pers.

- Penyuluhan Kesadaran Hukum

Landasan utama usaha penyuluhan hukum adalah UUD 1945. Bertitik tolak dari penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(machstaat*). Pernyataan ini merupakan kesepakatan bangsa Indonesia melalui wakilnya para pembuat UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Guna mewujudkan pernyataan tersebut di atas, pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan, salah satu yang terpenting dalam hubungannya dengan penyuluhan hukum adalah pasal 27 ayat yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pe-merintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan. Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat menyadari dan menghayati dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945. Penyuluhan hukum adalah usaha-usaha untuk meng-komunikasikan informasi

mengenai hak-hak dan ke-wajiban warga negara yang telah diatur oleh hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna memperluas penguasaan dan pengendalian sumber daya hukum rakyat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Mengenai pola dasar penyuluhan hukum dan pola operasional penyuluhan hukum dimaksudkan untuk dijadikan pedoman secara garis besar dalam merencana-kan melaksanakan penyuluhan hukum secara terarah dan terpadu.

Penyuluhan Kesadaran Hukum ini merupakan salah satu tugas humas Kejati Jabar dimana humas memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat, sampai ke daerah-daerah untuk membimbing masyarakat taat hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka penegakan hukum suatu negara demokrasi yang tertib hukum. Perlu kita sadari bahwa upaya untuk menciptakan kesadaran hukum bukan suatu hal yang sederhana, sebab hukum sebagai suatu produk sosial yang tidak nyata (*intangible product*) tidak semudah memasarkan sama dengan produk-produk nyata (*tangible product*) yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu format perencanaan komunikasi yang selama ini banyak dikaji dan dikembangkan oleh studi komunikasi pembangunan dapat diaplikasikan dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat yang buta atau kurang memahami tentang hukum. Pola operasional penyuluhan hukum merumuskan metode penyuluhan hukum adalah suatu rakitan antara pendekatan, teknik dan sarana/media penyuluhan hukum.

Kejaksaan melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang dipopulerkan dengan nama Jaksa Masuk Desa. Jangkauan utamanya ialah masyarakat pedesaan yang terpencil dari hubungan komunikasi dan transportasi pada umumnya. Mengingat sasaran kegiatan adalah masyarakat pedesaan yang awam/buta hukum maka teknik dan sistem pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara manusiawi dan kemasyarakatan dan bukan pendekatan secara teknis hukum.

Pada hakekatnya kegiatan ini tidak semata-mata ditujukan kepada warga masyarakat di daerah, melainkan juga ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri agar dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan, diantaranya penerangan tentang fungsi dan tugas pengadilan melalui brosur-brosur yang disebarluaskan ke daerah-daerah, penyuluhan pada masyarakat dalam bentuk ceramah, wawancara, di TV/RRI, radio swasta, tempat-tempat umum dan publikasi media cetak lainnya.

Dalam kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) antusias masyarakat sangat besar. Bahkan masyarakat juga mengharapkan agar pelaksanaan Penyuluhan / Penerangan Hukum dalam lingkungannya dapat diulangi kembali. Dari hasil pengamatan dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan / Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) yang diadakan

selama ini telah dapat dibina kerjasama yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintah yang terkait yang ada di Daerah Jawa Barat.

Keterpaduan ini secara terus menerus akan diusahakan untuk dapat dibina dan ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku karena program BINMATKUM adalah program Nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Humas sebagai bagian dari manajemen perusahaan/organisasi, berorientasi pada aktivitas yang dilakukan oleh industri, perusahaan, perserikatan, organisasi sosial, atau jabatan pemerintah, untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan maksud menyesuaikan dirinya pada keadaan sekeliling dan memperkenalkan diri pada masyarakat.

Humas mempunyai tugas menjadi “corong” atau publikasi kepada masyarakat agar citra organisasi tetap baik dan menjadi “mediator” yang menjembatani kepentingan organisasi / perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan Humas itu sendiri. Berbagai aktifitas Humas senantiasa menciptakan, menjaga dan meningkatkan citra yang positif.

Humas menyadari bahwa komunikasi yang baik dan etis serta hubungan manusiawi merupakan instrument dalam mengatasi hubungan yang tegang ataupun sampai tejadinya konflik. Hal ini terjadi karena adanya pengertian. Dan dengan komunikasi itu muncul adanya saling pengertian dan kepercayaan. Artinya mengakui bila ada kesalahan, kekeliruan, tetapi menyadari bahwa ada

kemungkinan untuk mengadakan perbaikan demi perkembangan dan akan lebih menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini jaminan yang terhandal ialah "saling adanya keterbukaan".

Dalam hal ini seorang Humas dibutuhkan bagi perusahaan (lembaga) guna membangun *image bulding*, karena Humas merupakan alat (fungsi) yang digunakan suatu organisasi dalam menciptakan harmoni atau keseimbangan hubungan (*relations*) antara manajemen dengan publiknya akibat adanya konsekuensi kepentingan kedua pihak yang muncul dalam beinteraksi, dalam menciptakan harmoni ini Humas menggunakan komunikasi sebagai perangkat kerjanya, utamanya komunikasi yang sifatnya timbal balik dan mendorong terwujudnya saling pengertian dan kerjasama.

2.5 Analisis Pelayanan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kepada Mahasiswa PKL

Pelayanan menurut Hartanto (1999:2) yaitu :

> "Upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan/pengunjung berupa pemberian kemudahan, kelancaran, kenyamana serta keamanan kepada pelanggan dari pihak perusahaan. J. P. G Sianipar menyatakan bahwa pelayanan tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik pelayanan akan tetapi meliputi juga dimensi empati yaitu tingkat perhatian dan kepedulian penyedia jasa atas kepentingan, kebutuhan dan keluhan pelanggan (penerima jasa)." (1999 : 2)

Dari uraian diatas maka hal penting mengenai pelayanan yaitu :

Pertama, pelayanan bersifat tanpa wujud *(intangible*) artinya upaya dari aktifitas pelayanan dapat dirasakan oleh pelanggan yang menerima pelayanan (puas/tidak puas). Kedua, pelayanan dapat berbentuk pemberian kemudahan,

kelancaran, kenyamanan, serta keamanan dalam diri pelanggan. Maka dari itu pelayanan pelanggan (*Costumers service*) amat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas suatu perusahaan dan menjaga citra perusahaan semakin meningkat.

Pengertian lain menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan atas unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip *intangileble* dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan apapun, produksinya bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

Pelayanan yang diberikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penulis baik. Selama melakasanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, penulis merasakan suasana yang cukup menyenangkan, dan karyawan-karyawannya yang ramah dan kekeluargaan walaupun dalam melaksanakan kegiatan rutin, penulis tidak seluruhnya mengerjakan kegiatan yang dilakukan oleh Humas akan tetapi sebagian mengerjakan tugas administrasi yaitu memasukan surat masuk dan surat keluar ke dalam agenda. Penulis pun diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan – kegiatan insidental yang bisanya dilakukan oleh Humas.

Selain itu juga penulis diberikan kesempatan untuk meliputan dan mendokumentasikan kegiatan – kegiatan insidental Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama – sama dengan teman PKL lainnya. Bila penulis mengalami kesulitan, hambatan, ataupun hasil yang kurang sempurna maka pihak Humas dan pegawai mengoreksi dari hasil yang telah penulis lakukan, sehingga hal tersebut menjadi

suatu pembelajaran bagi penulis agar dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang, khususnya dalam bidang Humas.

Hasil dari kerja praktek ini adalah memberikan suatu pemahaman yang berarti bagi penulis tentang bagaimana Humas melaksanakan tugasnya, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses komunikasi dengan publik internal maupun eksternal lembaga serta dapat membina hubungan baik dengan media.